



## **DINAMIKA ISLAM PADA MASA ORDE BARU (1966-1998)**

**Afrita Rahma Amalia**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
[afritarahmaamalia@gmail.com](mailto:afritarahmaamalia@gmail.com)

**Nisfia Rahma Nuril Izati**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
[nisfiarahma95@gmail.com](mailto:nisfiarahma95@gmail.com)

**Mohammad Riski Arifin**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
[rizkiarifin@gmail.com](mailto:rizkiarifin@gmail.com)

**Moh. Gilang Angga Kusuma**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
[gilanganggakusuma2807@gmail.com](mailto:gilanganggakusuma2807@gmail.com)

**Muhammad Izzudin Al Wafa**

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri  
[izzudinalwafa@gmail.com](mailto:izzudinalwafa@gmail.com)

**Abstract:** This study discusses the dynamics of Islam during the *Orde Baru* ‘New Order’ era from 1966–1998, especially the relationship between Islam, the military, and the state. The purpose of this study is to analyze the development of Islamic political movements, the military’s dominance in politics, and the accommodative policies of the New Order government toward Muslims. This research uses a literature study method by examining books, journals, and historical documents related to Islam and politics during the New Order period. The results show that at the beginning of the New Order, Islamic political movements experienced marginalization and strict political control through policies such as party simplification, the implementation of Pancasila as the sole ideology, and military domination through the ABRI dual-function doctrine. However, since the late 1980s, the relationship between Islam and the state gradually became more harmonious. The emergence of moderate Muslim intellectuals and the accommodative attitude of the government opened wider opportunities for Muslims in politics, bureaucracy, and social life. This condition marked the revival of Islamic politics in a more substantive and inclusive form. In conclusion, the dynamics of Islam during the New Order reflected a transition from political repression to accommodation between the state, military, and Islamic groups.  
**Keywords:** *Islam, New Order, military, politics, accommodation.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas dinamika Islam pada masa Orde Baru tahun 1966–1998, khususnya hubungan antara Islam, militer, dan negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan gerakan Islam politik, dominasi militer dalam politik, serta kebijakan akomodatif pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan Islam dan politik pada masa Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal Orde Baru, gerakan Islam politik mengalami peminggiran dan pengawasan ketat melalui kebijakan penyederhanaan partai, penerapan asas tunggal Pancasila, serta dominasi militer melalui konsep Dwifungsi ABRI. Namun, sejak akhir 1980-an hubungan Islam dan negara mulai mengalami perubahan yang lebih harmonis. Munculnya intelektual Muslim moderat dan sikap pemerintah yang lebih akomodatif membuka ruang lebih luas bagi umat Islam dalam bidang politik, birokrasi, dan kehidupan sosial. Kondisi tersebut menandai kebangkitan Islam politik dalam bentuk yang lebih substantif dan inklusif. Dengan demikian, dinamika Islam pada masa Orde Baru menunjukkan perubahan dari hubungan yang represif menuju hubungan yang lebih akomodatif antara negara, militer, dan umat Islam.

**Kata kunci:** *Islam, Orde Baru, militer, politik, akomodasi.*

## PENDAHULUAN

Masa Orde Baru merepresentasikan salah satu periode krusial dalam sejarah politik Indonesia, yang secara fundamental ditandai oleh hegemoni militer dan intervensi penetratif negara terhadap struktur sosial-politik masyarakat sipil. Pasca-runtuhnya rezim Soekarno yang dipicu oleh turbulensi G30S/PKI pada 1965, Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan melalui pilar stabilitas politik dan akselerasi pembangunan nasional. Dalam era ini, militer melegitimasi posisinya melalui doktrin Dwifungsi ABRI, sebuah instrumen yang memberikan justifikasi ganda bagi militer untuk mengokupasi ranah pertahanan sekaligus mendominasi kendali politik pemerintahan. Pengaturan kekuasaan ini berdampak sistemik terhadap lintasan gerakan Islam politik di Indonesia.

Pada fase awal konsolidasi Orde Baru, relasi antara negara dan kelompok Islam politik diwarnai oleh ketegangan dan kecurigaan. Negara memosisikan entitas Islam politik sebagai kekuatan subversif laten yang berpotensi merongrong ekuilibrium stabilitas nasional, sehingga berbagai instrumen represi struktural dikerahkan untuk mendemobilisasi ruang gerakannya. Kebijakan fusi partai politik, pemaksaan asas tunggal Pancasila, hingga pengawasan ketat terhadap organ-organ Islam merupakan

manifestasi sistematis dari depolitisasi Islam kala itu. Kendati mengalami represi dan marginalisasi di awal kekuasaan, pergeseran pendulum politik terjadi sejak akhir dekade 1980-an ketika rezim mulai memperlihatkan gerakan yang lebih terbuka dan akomodatif. Transisi ini didorong oleh munculnya generasi baru intelektual Muslim moderat yang mengusung pendekatan substantif alih-alih formalistik, yang pada akhirnya merekonstruksi harmoni antara Islam, militer, dan negara menjelang kejatuhan rezim.

Untuk mengontekstualisasikan urgensi wacana ini, tinjauan terhadap kajian pustaka dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memperlihatkan tiga lokus perdebatan akademis mutakhir yang didominasi oleh dinamika pasca-Orde Baru. Pertama, kajian mengenai Islam politik kontemporer yang secara ekstensif menyoroti kebangkitan "post-Islamisme" serta polarisasi diskursif seputar penerapan syariat dalam ruang demokrasi yang terdesentralisasi<sup>1</sup>. Berbagai temuan dalam spektrum ini mengonfirmasi bahwa pasca-1998, entitas Islam politik telah bertransformasi dari sekadar advokasi formalistik negara Islam menuju pengerahan basis massa, apropriasi ruang publik, dan pragmatisme elektoral<sup>2</sup>. Kedua, literatur mengenai hubungan sipil-militer pasca-Soeharto menitikberatkan pada turbulensi transisi demokrasi dan kompleksitas legislasi guna membatasi kembalinya supremasi militer, yang tak lepas dari memori kolektif akan doktrin Dwifungsi<sup>3</sup>. Kajian-kajian tersebut mengobservasi secara kritis bagaimana residu dari militerisme masa lalu terus berupaya

---

<sup>1</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, "Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2015): 1–22, <https://doi.org/10.7454/MJS.v20i1.1089>; Joko Arizal, "PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>.

<sup>2</sup> Muchammad Nur Huda, "Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia," *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)* 3, no. 2 (2021): 46–53, <https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94>; Muhamad Ridwan Effendi and Iqbal Syafrudin, "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 2 (2020): 12–27, <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528>.

<sup>3</sup> Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, "Civil–Military Relations during Transition and Post-Democratisation Periods: A View from Southeast Asia," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 36, no. 2 (2017): 137–48, <https://doi.org/10.1177/186810341703600205>; Victor Imanuel W. Nalle, "Legislating Civil–Military Relations in Post-Reformasi Indonesia," *Global Change, Peace & Security* 37, no. 2 (2026): 125–42, <https://doi.org/10.1080/14781158.2025.2611247>.

menegosiasikan otoritasnya di tengah kelembagaan sipil<sup>4</sup>. Ketiga, diskursus mengenai transformasi Islam Indonesia difokuskan pada artikulasi keberagaman baru, ditandai dengan munculnya kelas menengah Muslim urban yang hibrid dalam mengintegrasikan kesalehan dengan modernitas dan budaya populer<sup>5</sup>, serta adaptasi institusi keislaman dalam menyikapi digitalisasi global dan akselerasi kecerdasan buatan<sup>6</sup>.

Meskipun beberapa literatur mutakhir tersebut sangat solid dalam memetakan lanskap Islam politik, arsitektur relasi sipil-militer, dan transformasi sosial pasca-Orde Baru, terdapat kekosongan literatur yang mendasar. Mayoritas kajian cenderung bertumpu pada bias standar kontemporer di mana kolapsnya rezim pada tahun 1998 didudukkan secara ahistoris sebagai titik nol perubahan politik tanpa melacak secara memadai akar pergeseran yang justru berinkubasi kuat sejak dekade terakhir pemerintahan Orde Baru. Kajian kontemporer kerap luput menganalisis bahwa transformasi Islam menuju paradigma moderat-substantif serta pergeseran demografi militer menuju faksi perwira santri merupakan produk dari dialog kultural dan akomodasi rezim pada rentang akhir 1980-an hingga 1990-an. Oleh karena itu, artikel ini mengambil posisi krusial untuk mengisi celah keilmuan tersebut dengan merekonstruksi historiografi dinamika tahun 1966–1998. Pembacaan analitis atas masa Orde Baru ini mutlak diperlukan sebagai referensi historis untuk mengurai embrio fenomena kebangkitan politik Islam dan polarisasi relasi warga sipil dan militer di Indonesia yang aktual.

---

<sup>4</sup> Leonard C. Sebastian et al., “Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period,” *Asia Policy* 13, no. 3 (2018): 49–78, <https://doi.org/10.1353/asp.2018.0041>.

<sup>5</sup> Akhmad Ramidi and Suhaili, “Menjadi Muslim Urban: Negosiasi Identitas dan Kesalehan Anak Muda Indonesia,” *Ulul Albab: Journal Da`wah and Social Religiosity* 3, no. 2 (2025): 24–35, <https://doi.org/10.69943/t5c3ec13>; Ahmad Suaedy, “TRANSFORMASI ISLAM INDONESIA DALAM TREND GLOBAL: Mencari Penjelasan ‘Moderasi Beragama’ di Ruang Publik,” *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 24, no. 3 (2022): 319–32, <https://doi.org/10.55981/jmb.1807>.

<sup>6</sup> Kholil Syamsul and Abd. Muis, “Islamic Education in the Age of Artificial Intelligence Policy Responses to Digital Transformation and Teacher Competency Challenges,” *DAAR EL-MAKRIFAH: Journal of Islamic Religious Education* 2, no. 1 (2026): 126–44, <https://doi.org/10.66931/jpai.v2i01.417>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sejarah (*historical research*) dengan pendekatan kualitatif yang dititikberatkan pada studi kepustakaan (*library research*). Metode sejarah dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada rekonstruksi dan analisis peristiwa masa lampau, khususnya dinamika hubungan antara Islam, militer, dan negara pada periode Orde Baru (1966–1998). Untuk menghasilkan kajian sejarah yang sistematis, komprehensif, dan objektif, penelitian ini menempuh empat tahapan utama metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan tahapan awal yang berfokus pada proses pencarian, penemuan, dan pengumpulan jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik kajian. Dalam penelitian ini, sumber-sumber yang dikumpulkan berupa sumber tertulis, yang terdiri dari buku-buku referensi, jurnal ilmiah, catatan sejarah, serta dokumen-dokumen kebijakan politik pemerintah yang berkaitan dengan Islam dan militer pada masa Orde Baru. Pencarian sumber difokuskan pada literatur yang merekam dinamika represi politik Islam, dominasi ABRI, hingga lahirnya gerakan intelektual Muslim moderat. Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber atau verifikasi, yang bertujuan untuk menguji keabsahan dan keandalan sumber sejarah. Tahap ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan autentisitas atau keaslian fisik literatur seperti kejelasan penulis dan tahun terbit, sedangkan kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas objektivitas isi atau informasi di dalam teks. Mengingat literatur mengenai rezim Orde Baru rentan terhadap subjektivitas atau bias politik, peneliti melakukan perbandingan dan pemeriksaan silang antarberbagai sumber agar fakta sejarah yang digunakan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta sejarah yang telah terverifikasi melalui tahapan kritik kemudian dianalisis dalam tahap interpretasi. Pada tahap ini, peneliti memberikan penafsiran, pemaknaan, serta merangkai keterkaitan antarperistiwa. Peneliti menganalisis secara mendalam bagaimana konsep Dwifungsi ABRI memengaruhi peminggiran gerakan Islam politik di awal Orde Baru, serta bagaimana munculnya generasi baru pemikir Muslim seperti Nurcholish Madjid dkk. mampu mengubah konstelasi politik. Fakta-fakta tersebut disintesis untuk menemukan

benang merah proses transisi negara, dari yang awalnya bersikap represif menjadi akomodatif terhadap umat Islam pada era 1990-an. Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi, yakni proses penulisan dan penyajian hasil penelitian ke dalam sebuah karya tulis sejarah (artikel ilmiah). Fakta sejarah yang telah diinterpretasikan kemudian disusun secara kronologis, tematik, sistematis, dan logis. Dalam penulisan ini, narasi dibangun mulai dari tinjauan pergumulan Islam dan negara di awal berdirinya Orde Baru, era depolitisasi, hingga masa kebangkitan politik Islam dan harmonisasi hubungan antara umat Islam, militer, dan negara menjelang jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Historis Pergumulan Islam dan Negara Pada Masa Awal Orde Baru**

#### **A. Awal Kebangkitan Orde Baru**

Awal lahirnya Orde Baru ditandai dengan melemahnya kekuasaan Presiden Soekarno setelah peristiwa G30S/PKI tahun 1965. TNI Angkatan Darat berhasil menghancurkan PKI sekaligus tampil sebagai kekuatan politik utama di Indonesia. Kemunculan Soeharto pada tahun 1966 dengan dukungan penuh militer menjadi awal terbentuknya pemerintahan Orde Baru.

Situasi politik saat itu sangat tegang, terutama karena dukungan Soekarno terhadap konsep “Angkatan Kelima” yang dianggap mengancam dominasi Angkatan Darat. Ketegangan memuncak pada peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal pada 30 September 1965 yang kemudian dijadikan dasar untuk menuduh PKI sebagai dalang kudeta<sup>7</sup>.

Setelah itu, Soeharto memperoleh kewenangan untuk memulihkan keamanan melalui Supersemar dan membentuk Kopkamtib. Militer bersama kelompok mahasiswa seperti KAMI, KAPPI, dan KASI bergerak menekan Soekarno dan menuntut pembubaran PKI. Di berbagai daerah terjadi pembantaian massal terhadap

---

<sup>7</sup> Harold A. Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, 1st ed. (Equinox Pub, 2007); Rex Mortimer, “Class, Social Cleavage and Indonesian Communism,” *Indonesia* 8 (October 1969): 1–20.

orang-orang yang dituduh terkait PKI, dengan dukungan sejumlah kelompok Islam seperti NU dan Muhammadiyah<sup>8</sup>.

Kondisi politik dan ekonomi yang semakin buruk memicu lahirnya Tritura yang berisi tuntutan pembubaran PKI, pembentukan kabinet baru, dan penurunan harga. Puncaknya terjadi pada 11 Maret 1966 ketika Soekarno menandatangani Supersemar yang memberikan kewenangan besar kepada Soeharto. Berdasarkan surat tersebut, Soeharto membubarkan PKI dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan.

Pada Juli 1966, pembentukan Kabinet Ampera menjadi simbol lahirnya pemerintahan Orde Baru. Meskipun masih melibatkan unsur Orde Lama, kekuasaan politik sebenarnya sudah berada di tangan Soeharto dan militer<sup>9</sup>.

## **B. Islam dan Politik pada Awal Orde Baru**

Pada awal Orde Baru, banyak tokoh Islam berharap memperoleh kembali peran penting dalam politik setelah jatuhnya PKI dan melemahnya kekuasaan Soekarno. Mantan pemimpin Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) menjadi kelompok yang paling optimis, terutama setelah beberapa tokohnya dibebaskan dari penjara. Harapan tersebut mendorong lahirnya BKAM pada tahun 1966 untuk memperjuangkan rehabilitasi politik Islam<sup>10</sup>.

Namun, pemerintah Orde Baru bersikap ambivalen terhadap Islam politik. Pemerintah mendukung Islam sebagai kekuatan moral dan penangkal komunisme, tetapi tetap membatasi aktivitas politik umat Islam karena khawatir akan mengganggu stabilitas negara. Sikap ini terlihat dari penolakan pemerintah terhadap rehabilitasi Partai Masyumi yang dianggap terkait dengan pemberontakan PRRI-Permesta dan DI/TII<sup>11</sup>.

Sebagai alternatif, mantan tokoh Masyumi membentuk partai baru bernama Parmusi pada tahun 1968. Akan tetapi, pemerintah melarang tokoh senior Masyumi menduduki posisi penting dalam partai tersebut. Ketika Parmusi mulai bersikap kritis

---

<sup>8</sup> Ulf Sundhaussen, *Politik militer Indonesia 1945-1967: menuju dwi fungsi ABRI*, ed. Masmimar Mangiang, trans. Hasan Basari (LP3ES, 1986).

<sup>9</sup> Guy J. Pauker, "Indonesia: The Year of Transition," *Asian Survey* 7, no. 2 (1967): 138–50, <https://doi.org/10.2307/2642526>.

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, ed. A. E. Priyono (Mizan, 2008).

<sup>11</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*, 2nd ed., ed. Julizar Firmansyah (Gema Insani Press, 1996).

terhadap pemerintah, Orde Baru semakin memperketat pengawasan dan bahkan campur tangan dalam kepemimpinan partai, termasuk mengganti pimpinan Parmusi pada tahun 1970<sup>12</sup>.

Hubungan pemerintah dan kelompok Islam politik semakin memburuk setelah pemerintah menolak usulan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta serta menolak Kongres Umat Islam Indonesia tahun 1968. Akibatnya, banyak aktivis Islam menilai Orde Baru cenderung sekuler dan tidak memberikan ruang besar bagi aspirasi politik Islam, sementara pemerintah tetap mencurigai loyalitas politik kelompok Islam terhadap Pancasila<sup>13</sup>.

### **C. Ambivalensi Hubungan Islam dan Militer**

Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 memperburuk kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia serta memicu jatuhnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Dalam situasi tersebut, kelompok-kelompok Islam menjalin kerja sama erat dengan Angkatan Darat untuk menumpas PKI yang dianggap sebagai ancaman besar bagi agama dan negara. Dukungan umat Islam, mahasiswa, dan pelajar membuat gerakan anti-PKI semakin kuat, sementara militer menjadi kekuatan utama yang mengendalikan arah politik nasional<sup>14</sup>.

Setelah Partai Masyumi dibubarkan, banyak kader Islam modernis aktif dalam organisasi mahasiswa seperti HMI dan PII. Mereka bekerja sama dengan militer dan kelompok anti-komunis lainnya untuk menghadapi pengaruh PKI. Hubungan Islam dan militer semakin erat ketika organisasi-organisasi Islam, termasuk NU, ikut membantu gerakan anti-komunis. Melalui wadah seperti KAMI, mahasiswa Islam menjadi kekuatan penting dalam demonstrasi yang menekan Soekarno dan mendukung lahirnya Orde Baru<sup>15</sup>.

Meskipun pada awalnya hubungan Islam dan militer terlihat harmonis, keadaan tersebut berubah setelah Orde Baru semakin kuat. Kelompok Islam yang sebelumnya

---

<sup>12</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia* (Paramadina, 1998).

<sup>13</sup> Effendy, *Islam dan Negara*.

<sup>14</sup> Barbara Freyer Stowasser, "Agama Dan Perkembangan Politik: Antara Ibn Khaldun Dan Machiavelli," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan* 5, no. 4 (1994).

<sup>15</sup> Agussalim Sitompul, *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta: Antara Impian Dan Kenyataan* (Gunung Agung, 1982).

membantu militer justru mengalami pembatasan politik dan tekanan dari pemerintah. Organisasi seperti HMI, PII, dan NU mulai diawasi ketika mengkritik kebijakan negara. Ketegangan semakin besar setelah pemerintah menolak gagasan Piagam Jakarta dan membatasi aspirasi politik Islam, sehingga hubungan antara umat Islam dan rezim Orde Baru menjadi semakin renggang.

#### **D. Benih Dominasi Militer**

Pada awal Orde Baru, militer menjadi kekuatan politik paling dominan di Indonesia karena tidak ada kelompok lain yang mampu menandingi organisasi dan kekuatannya. Kelompok sipil seperti mahasiswa, buruh, dan organisasi massa tidak mampu mempertahankan persatuan politik secara kuat. Sebenarnya kelompok Islam memiliki potensi untuk mengimbangi militer, tetapi perpecahan internal membuat kekuatan tersebut melemah<sup>16</sup>.

Keterlibatan militer dalam politik dipengaruhi oleh lemahnya pemerintahan sipil serta pengalaman sejarah perjuangan kemerdekaan. Sejak revolusi 1945–1949, tentara tidak hanya berperan dalam bidang militer, tetapi juga terlibat dalam urusan politik karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan semangat nasionalisme dan dukungan rakyat. Sistem perang gerilya yang bergantung pada masyarakat sipil juga membuat hubungan antara militer dan rakyat menjadi sangat dekat<sup>17</sup>.

Hubungan militer dan elite sipil sejak awal kemerdekaan sering diwarnai konflik, terutama mengenai strategi menghadapi Belanda. Militer lebih mendukung perjuangan bersenjata, sedangkan tokoh sipil seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir memilih jalur diplomasi. Kritik tokoh sipil terhadap tentara dan bekas pasukan PETA maupun KNIL menimbulkan rasa tidak percaya militer terhadap politisi sipil.

Dominasi militer semakin kuat karena beberapa faktor. Pertama, militer mengembangkan nasionalisme versi sendiri dan menolak dominasi partai politik terhadap angkatan bersenjata. Kedua, konflik antara laskar dan tentara reguler membuat militer mencari dukungan politik untuk mempertahankan pengaruhnya.

---

<sup>16</sup> A. Budi Susanto and A. Made Tony Supriatma, *ABRI: Siasat Kebudayaan, 1945-1995*, Cet. 1 (Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino, 1995).

<sup>17</sup> Tahi Bonar Simatupang, "Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kesejarahan Dan Perspektif Masa Depan," in *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia*, ed. Farchan Bulkin (LP3ES, 1985).

Ketiga, berbagai pemberontakan seperti Madiun 1948, G30S/PKI, DI/TII, dan PRRI-Permesta membentuk trauma politik di kalangan militer sehingga mereka curiga terhadap komunisme maupun Islam politik radikal. Faktor-faktor inilah yang menjadi dasar munculnya dominasi militer dalam pemerintahan Orde Baru<sup>18</sup>.

## **Dari Kekerasan dan Peminggiran Menuju semangat Kebangkitan Islam Politik (1976-1988)**

### **A. Jurus Politik Orde Baru**

#### **1. Militer dan Politik Kekerasan pada Masa Orde Baru**

Politik kekerasan pada masa Orde Baru berakar dari lahirnya rezim tersebut setelah peristiwa G30S/PKI dan jatuhnya Soekarno. Pengalaman politik masa Orde Lama membuat militer dan elite Orde Baru sangat menekankan stabilitas politik serta menggunakan pendekatan represif untuk mempertahankan kekuasaan.

Sepanjang pemerintahan Soeharto, berbagai tindakan kekerasan negara terjadi terhadap gerakan mahasiswa, oposisi politik, dan kelompok masyarakat. Peristiwa penting antara lain tragedi Malari 1974, penindasan gerakan mahasiswa tahun 1978, tekanan terhadap tokoh Petisi 50 pada 1980, operasi penembakan misterius (Petrus) tahun 1983, tragedi Tanjung Priok 1984, dan peristiwa Talangsari 1989. Semua peristiwa tersebut menunjukkan kuatnya peran militer dalam bidang politik, keamanan, sosial, dan ideologi<sup>19</sup>.

Pemerintah Orde Baru menggunakan kekuatan militer dan aparat keamanan untuk mengendalikan kritik, protes, dan gerakan yang dianggap mengancam stabilitas negara. Akibatnya, muncul suasana ketakutan di masyarakat karena tindakan represif dilakukan secara sistematis sejak akhir 1960-an hingga 1980-an<sup>20</sup>.

Menurut para pengamat seperti Utrecht dan Pramodya Ananta Toer, politik kekerasan Orde Baru menciptakan budaya takut dan membatasi kebebasan

---

<sup>18</sup> Salim Said, "Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang Dan Pada Masa Datang," in *Prisma: Angkatan Muda Angkat Bicara*, vol. 6 (LP3ES, 1987).

<sup>19</sup> Saurip Kadi, *TNI-AD dahulu, sekarang, dan masa depan*, Cet. 1, with Pusat Studi Masalah-Masalah Militer (Jakarta, Indonesia) (Pustaka Utama Grafiti, 2000).

<sup>20</sup> Frans Husken and Hubb de Jonge, *Orde Zonder Order: Kekerasan Dan Dendam Di Indonesia 1965-1998*, ed. Retno Suffatni, trans. M. Imam Aziz (LKIS, 2002).

masyarakat. Dominasi negara yang didukung militer menyebabkan lembaga demokrasi dan kekuatan masyarakat sipil semakin lemah selama pemerintahan Orde Baru<sup>21</sup>.

## 2. Dwifungsi dan Hegemoni Militer

Dominasi militer pada masa Orde Baru, terutama pada dekade 1970-an hingga 1980-an, memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut terlihat dalam pola pikir, sikap, serta perilaku masyarakat sipil dan birokrat yang banyak dipengaruhi budaya militer. Dominasi ini diperkuat melalui konsep Dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda militer sebagai kekuatan pertahanan keamanan sekaligus kekuatan sosial politik. Dengan konsep tersebut, militer tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam pemerintahan dan politik nasional<sup>22</sup>.

Penguatan Dwifungsi ABRI dimulai sejak Seminar Angkatan Darat II tahun 1966 yang menghasilkan konsep keterlibatan militer dalam kepemimpinan nasional demi mendukung stabilitas politik dan pembangunan. Konsep ini sebenarnya sudah berakar sejak masa Sukarno melalui doktrin “Jalan Tengah” yang diperkenalkan A.H. Nasution pada tahun 1958. Namun, pada masa Soeharto, Dwifungsi ABRI semakin dilembagakan melalui berbagai kebijakan dan peraturan negara. Militer kemudian menduduki banyak jabatan strategis, mulai dari presiden, menteri, gubernur, hingga pejabat daerah. Selain itu, lembaga seperti Kopkamtib memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik nasional<sup>23</sup>.

Pemerintah Orde Baru juga melakukan intervensi terhadap partai politik demi menjaga stabilitas politik, termasuk menyederhanakan partai menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Akibatnya, ruang politik masyarakat sipil menjadi semakin terbatas. Menurut Harold Crouch, keterlibatan militer dalam politik dan bisnis menimbulkan dampak negatif, seperti

---

<sup>21</sup> Cholisin, *Militer Dan Gerakan Prodemokrasi: Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi Di Indonesia*, 1st ed. (Tiara Wacana Yogya, 2002).

<sup>22</sup> J. Soedjati Djiwandono, “Hegemoni Militerisme,” in *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*, ed. Anas S. Machfudz and Jaleswari Pramodawardhani (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001).

<sup>23</sup> Soebijono, ed., *Dwifungsi ABRI: perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*, Cet. 1 (Gadjah Mada University Press, 1992).

hilangnya netralitas militer dan semakin kuatnya kepentingan kekuasaan dalam tubuh militer. Dengan demikian, Dwifungsi ABRI menjadi simbol utama dominasi militer dalam sistem politik Orde Baru yang membatasi demokrasi dan memperlemah partisipasi politik rakyat<sup>24</sup>.

### 3. Peminggiran Gerakan Islam Politik pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah memandang Islam politik sebagai “ekstrem kanan”, sementara komunisme disebut “ekstrem kiri”. Setelah peristiwa 1965, pemerintah tidak hanya menindak PKI, tetapi juga mengawasi dan membatasi kelompok Islam yang dianggap mendukung negara Islam. Akibatnya, banyak aktivis Islam mengalami diskriminasi, penangkapan, dan peminggiran politik<sup>25</sup>.

Pemerintah membedakan antara kehidupan beragama dan politik Islam. Praktik keagamaan tetap didukung untuk melawan komunisme, tetapi aktivitas politik Islam dibatasi secara ketat. Partai-partai Islam digabungkan ke dalam PPP pada tahun 1973, simbol-simbol Islam dikurangi, dan pada tahun 1984 seluruh organisasi diwajibkan memakai Pancasila sebagai asas tunggal<sup>26</sup>.

Hubungan pemerintah dan umat Islam semakin memburuk karena berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam, seperti RUU Perkawinan 1973, SDSB, larangan jilbab di sekolah, program KB, dan maraknya minuman keras. Banyak umat Islam menilai pemerintah semakin menjauh dari aspirasi Islam.

Peminggiran Islam politik juga dipengaruhi kerja sama antara militer, kelompok nasionalis, dan kelompok tertentu yang menolak berkembangnya politik Islam. Akibatnya, kehidupan keagamaan sering hanya dijadikan formalitas dan alat legitimasi pemerintah.

Walaupun mengalami tekanan, berbagai kelompok Islam seperti bekas tokoh Masyumi, eks DI/TII, PSII, NU, Muhammadiyah, dan aktivis muda Islam tetap melakukan perlawanan terhadap kebijakan Orde Baru yang dianggap membatasi kebebasan politik umat Islam<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*.

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*.

<sup>26</sup> R. William Liddle, *Islam, Politik, Dan Modernisasi*, Cet. 1 (Pustaka Sinar Harapan, 1997).

<sup>27</sup> Liddle, *Islam, Politik, Dan Modernisasi*.

#### 4. Depolitisasi Islam Politik pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemerintah secara sistematis melakukan depolitisasi Islam dan melemahkan kekuatan partai politik sejak tahun 1969. Pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, menyederhanakan partai politik, memisahkan organisasi massa dari partai, serta menempatkan pembangunan ekonomi di atas aktivitas politik. Pegawai negeri juga diwajibkan loyal kepada pemerintah dan tidak aktif dalam partai politik.

Periode 1976–1988 menjadi masa kejayaan Orde Baru karena pertumbuhan ekonomi yang pesat akibat tingginya pendapatan minyak dan gas. Keberhasilan ekonomi ini memperkuat kekuasaan Soeharto dan membuat rezim semakin stabil. Namun, keberhasilan ekonomi tidak diikuti perkembangan demokrasi karena pemerintah justru memperketat kontrol politik dan ideologi<sup>28</sup>.

Pemerintah mewajibkan seluruh organisasi sosial dan politik menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Kebijakan ini ditolak banyak kelompok Islam karena dianggap melemahkan identitas politik Islam. HMI termasuk organisasi yang menentang kebijakan tersebut.

Dalam pemilu, pemerintah memberikan tekanan terhadap PPP sehingga menguntungkan Golkar. Situasi semakin melemah bagi politik Islam setelah NU (Nahdlatul Ulama) kembali ke Khittah 1926 dan meninggalkan politik praktis. Akibatnya, dukungan umat Islam terhadap PPP menurun tajam, terutama pada Pemilu 1987.

Walaupun pemerintah memberi ruang bagi praktik keagamaan, aktivitas politik Islam tetap dibatasi secara ketat. Sikap ini dipengaruhi kecurigaan pemerintah dan elite militer terhadap kemungkinan munculnya negara Islam, terutama karena pengalaman pemberontakan Islam pada masa sebelumnya. Karena itu, Orde Baru terus memperkuat pengawasan politik dan kekuasaan negara demi menjaga stabilitas serta mempertahankan kekuasaan rezim<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Liddle, *Islam, Politik, Dan Modernisasi*.

<sup>29</sup> Syamsuddin Haris, *PPP Dan Politik Orde Baru*, ed. Ridwan Saidi, Seri Pendidikan Politik (Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991).

## **B. Formula Baru Gagasan Islam Politik**

### **1. Merumuskan Kembali Landasan Islam Politik**

Maksudnya adalah bahwa Islam politik memandang agama Islam tidak hanya mengatur urusan spiritual, tetapi juga kehidupan sosial dan politik. Karena itu, umat Islam dianggap memiliki peran penting dalam sejarah dan pembangunan politik Indonesia, termasuk dalam menghadapi krisis nasional seperti peristiwa G30S/PKI. Dalam perkembangannya, hubungan antara kelompok santri dan abangan menjadi salah satu sumber ketegangan ideologis di Indonesia.

Walaupun memiliki semangat perjuangan yang kuat, politik Islam sering mengalami kegagalan. Para pengamat seperti Herbert Feith dan H.J. Benda menunjukkan bahwa kekuatan politik Islam tidak sebesar yang diperkirakan, terbukti dari hasil Pemilu 1955 ketika kelompok non-Islam mampu bersaing kuat. Kuntowijoyo menilai masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, lebih bersifat sinkretik atau abangan sehingga kelompok Islam sering berada di luar pusat kekuasaan dan cenderung menjadi oposisi pemerintah<sup>30</sup>.

Kelompok Islam politik lama umumnya memahami Islam secara formalistik dan meyakini bahwa cita-cita Islam hanya dapat diwujudkan melalui negara Islam. Mereka menganggap negara dan agama merupakan satu kesatuan sehingga terus memperjuangkan formalisasi Islam dalam negara. Namun, perjuangan tersebut justru membuat politik Islam mengalami kebuntuan dan semakin terpinggirkan pada tahun 1950-an hingga 1960-an.

Kemudian muncul generasi baru aktivis Islam yang menawarkan pendekatan berbeda. Mereka tidak lagi menekankan pembentukan negara Islam secara formal, tetapi lebih fokus pada penerapan nilai-nilai sosial, moral, dan kemasyarakatan Islam secara substantif dalam kehidupan bangsa dan negara.

### **2. Islam Alternatif**

Pada tahun 1970-an muncul pemikiran baru di kalangan muda Muslim yang dikenal sebagai “Islam Alternatif”. Kelompok ini mengkritik pandangan lama yang menganggap perjuangan Islam hanya dapat dilakukan melalui politik dan pendirian

---

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*.

negara Islam. Mereka lebih menekankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, demokrasi, persamaan, kemanusiaan, dan sikap inklusif.

Berbeda dengan Islam politik formalistik, kelompok ini lebih fokus pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari daripada memperjuangkan simbol atau lembaga negara Islam. Mereka berusaha menyesuaikan pemikiran Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural.

Pemikiran Islam alternatif juga menjadi strategi menghadapi kebijakan depolitisasi Orde Baru. Ketika ruang politik Islam dibatasi, kelompok muda Muslim memilih pendekatan yang lebih terbuka, fleksibel, dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah<sup>31</sup>.

Salah satu gagasan penting dari gerakan ini adalah slogan “Islam Yes, Partai Islam No.” Slogan tersebut menolak anggapan bahwa umat Islam harus selalu mendukung partai Islam tertentu, seperti PPP. Mereka menilai bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan melalui berbagai jalur sosial, budaya, dan politik tanpa harus melalui partai Islam formal<sup>32</sup>.

Perkembangan pemikiran ini menunjukkan tumbuhnya sikap inklusif dan penghargaan terhadap pluralisme di kalangan umat Islam, termasuk gagasan agar partai politik terbuka bagi semua golongan tanpa membedakan agama maupun latar belakang sosial budaya.

### 3. Gerakan Pembaruan “Pemikiran” Islam Politik

Setelah gerakan Islam politik mengalami peminggiran pada masa Orde Baru, muncul generasi baru Muslim yang membawa pembaruan pemikiran Islam politik dengan pendekatan yang lebih moderat, modern, dan terbuka. Tekanan politik dari pemerintah membuat generasi baru Islam berusaha mencari cara perjuangan yang lebih fleksibel agar aspirasi Islam tetap dapat diterima negara dan militer. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Mohammed Arkoun yang menilai umat Islam perlu memperbarui cara berpikir agar mampu mengikuti perkembangan zaman serta tidak

---

<sup>31</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Cet. 1, ed. Wahid Wahab (PT Tiara Wacana Yogya, 1999).

<sup>32</sup> A. Bakir Ihsan, “Perubahan Hubungan Islam Dan Militer Di Indonesia (1990-1998)” (Master Thesis, Universitas Indonesia, 2000).

hanya mengulang pola pemikiran lama. Karena itu, generasi baru Islam lebih menekankan substansi nilai-nilai Islam dibanding simbol formal seperti negara Islam atau partai Islam.

Menurut Bahtiar Effendy, gerakan pembaruan Islam politik terbagi menjadi tiga bentuk utama yaitu: (1) Pertama, pembaruan teologis atau keagamaan yang mengajak umat Islam memahami agama secara lebih modern dan terbuka. Kelompok ini menolak pendekatan formalistik negara Islam dan lebih menekankan semangat serta nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Tokoh-tokohnya antara lain Djohan Effendi, Ahmad Wahid, dan Nurcholish Madjid dengan slogan terkenalnya “Islam Yes, Partai Islam No.”; (2) Kedua, reformasi politik dan birokrasi yang meyakini bahwa hubungan Islam dan negara dapat diperbaiki melalui keterlibatan umat Islam dalam sistem politik dan birokrasi negara. Mereka memandang Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Tokoh-tokohnya antara lain Dahlan Ranuwihardjo, Sulastomo, dan sejumlah mantan aktivis HMI serta Parmusi; dan (3) Ketiga, transformasi sosial yang lebih menekankan perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat daripada perebutan kekuasaan politik. Kelompok ini lebih kritis terhadap pemerintah dan aktif melalui berbagai lembaga sosial serta gerakan intelektual. Tokoh penting dalam gerakan ini adalah M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dan Abdurrahman Wahid. Secara keseluruhan, gerakan pembaruan Islam politik bertujuan menjadikan Islam lebih inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern Indonesia<sup>33</sup>.

#### 4. Kebangkitan Islam Politik

Kebijakan politik Orde Baru yang sering menempatkan Islam pada posisi kurang menguntungkan mendorong para intelektual dan aktivis Muslim mencari strategi baru dalam perjuangan Islam politik. Hubungan antara Islam politik dan militer yang sering tegang membuat munculnya berbagai bentuk pembaruan yang lebih terbuka dan moderat. Dari situ lahir tiga model pembaruan, yaitu pembaruan teologis atau keagamaan, reformasi politik dan birokrasi, serta transformasi sosial.

Generasi pembaru Islam menilai pembubaran Masyumi, kegagalan rehabilitasi partai tersebut, penggabungan partai Islam ke dalam PPP, dan penerapan Pancasila

---

<sup>33</sup> Effendy, *Islam dan Negara*.

sebagai asas tunggal sebagai tanda melemahnya posisi politik umat Islam. Karena itu, mereka mulai meninggalkan pendekatan formal negara Islam dan memilih strategi yang lebih terbuka dengan mendekati kekuasaan melalui jalur sosial, birokrasi, dan politik yang lebih moderat. Mereka percaya bahwa Pancasila tetap dapat menjadi sarana untuk menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Sejak tahun 1970-an, generasi pembaru Islam terus mengembangkan gagasannya meskipun berada di bawah tekanan pemerintah dan militer. Pada akhir 1980-an, gerakan ini mulai mendapat ruang politik yang lebih besar dan tanggapan positif dari pemerintah. Melalui pemikiran yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid, Islam politik berkembang menjadi lebih moderat, inklusif, dan lebih diterima oleh negara maupun masyarakat sehingga membangkitkan optimisme baru bagi masa depan Islam politik di Indonesia.

### **Harmonisasi Islam dan Militer: Tanggapan Akomodatif Negara Atas Gerakan Islam Politik (1989-1998)**

#### **A. Menuju Arah Kemajuan Hubungan Islam-Militer dan Negara**

Pada awal Orde Baru, hubungan Islam politik dengan militer dan negara berlangsung tidak harmonis karena perjuangan sebagian kelompok Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara menimbulkan kecurigaan dari pihak militer. Perjuangan tersebut juga gagal memperoleh dukungan penuh dari umat Islam sehingga posisi politik Islam semakin melemah.

Selama sekitar 22 tahun pertama Orde Baru, akses kelompok Islam politik terhadap pemerintahan sangat terbatas. Hal ini terlihat dari penolakan Piagam Jakarta tahun 1968, pembatasan tokoh Masyumi dalam Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia), penyatuan partai-partai Islam ke dalam PPP tahun 1973, berkurangnya perwakilan Islam di parlemen dan kabinet, serta penerapan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1984. Akibatnya, Islam politik sering dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila dan negara.

Sejak awal 1970-an muncul generasi baru pemikir dan aktivis Muslim yang mencoba mengubah strategi perjuangan Islam. Mereka tidak lagi menekankan pendekatan formal dan legalistik seperti negara Islam, tetapi lebih mengutamakan

nilai-nilai substantif, terbuka, dan inklusif. Islam diposisikan sebagai sumber moral dan inspirasi sosial, bukan sekadar kekuatan politik.

Perubahan pendekatan tersebut mulai membawa hasil pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Pemerintah Orde Baru mulai bersikap lebih akomodatif terhadap umat Islam melalui berbagai kebijakan yang mendukung kepentingan sosial, ekonomi, dan politik Islam. Perubahan sikap Soeharto ini juga memengaruhi hubungan militer dengan gerakan Islam sehingga hubungan Islam, negara, dan militer menjadi lebih harmonis dibanding periode sebelumnya<sup>34</sup>.

### **B. Harmonisasi Islam dan Militer**

Hubungan Islam dan militer pada masa Orde Baru mengalami kerenggangan karena berbagai tindakan represif militer terhadap kelompok Islam yang dianggap menentang kebijakan negara. Akibatnya, hubungan baik antara umat Islam dan militer yang pernah terjalin saat menghadapi G30S/PKI dan awal lahirnya Orde Baru menjadi melemah<sup>35</sup>.

Salah satu penyebab utama ketegangan tersebut adalah dominasi elite militer dari kalangan abangan dan non-Muslim. Menurut beberapa pengamat, kelompok tersebut lebih banyak memperoleh kesempatan dalam rekrutmen dan posisi penting di militer, sementara representasi kelompok Islam berkurang, terutama setelah penyingkiran tentara Muslim yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1950-an.

Selain itu, sebagian kelompok Islam politik tetap memperjuangkan Islam sebagai dasar negara secara formal. Sikap yang dianggap formalistik dan eksklusif ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan militer karena dipandang bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi mengancam stabilitas negara.

Dominasi budaya abangan dalam tubuh militer juga terlihat dalam lingkungan pendidikan militer dan lingkaran dekat Soeharto yang banyak diisi tokoh seperti Ali Moertopo, L.B. Moerdani, dan Soedomo. Kondisi tersebut memperkuat kesan bahwa militer kurang dekat dengan aspirasi politik umat Islam.

Walaupun tidak ada aturan resmi yang diskriminatif terhadap umat Islam, banyak kalangan Muslim merasa mengalami perlakuan berbeda di lingkungan militer

---

<sup>34</sup> Liddle, *Islam, Politik, Dan Modernisasi*.

<sup>35</sup> Ihsan, "Perubahan Hubungan Islam Dan Militer Di Indonesia (1990-1998)."

dan pemerintahan. Perasaan diskriminasi ini semakin memperburuk hubungan antara Islam dan militer pada masa Orde Baru<sup>36</sup>.

### **C. Pergeseran Militer: Dari Abangan dan Non-Muslim ke Muslim Santri**

Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, terjadi perubahan dalam tubuh militer Orde Baru dari dominasi kelompok abangan dan non-Muslim menuju meningkatnya pengaruh perwira berlatar belakang santri. Perubahan ini berlangsung seiring dengan semakin terbukanya pemerintah terhadap Islam politik. Soeharto mulai memberi ruang lebih besar kepada tokoh dan perwira Muslim untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan maupun militer<sup>37</sup>.

Melemahnya pengaruh Leonardus Benjamin Moerdani menjadi awal perubahan tersebut. Jabatan penting di ABRI kemudian dipegang oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Try Sutrisno, Faisal Tanjung, dan R. Hartono. Kehadiran mereka membuat hubungan antara militer dan umat Islam menjadi lebih baik, terutama karena mereka dikenal dekat dengan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah<sup>38</sup>.

Walaupun pengaruh perwira Muslim semakin kuat, ideologi dasar militer tetap berpegang pada Pancasila, pluralisme, dan persatuan nasional. Militer tetap menolak konsep negara Islam dan hanya menerima kelompok Islam yang mendukung Pancasila. Selain itu, para perwira Muslim tetap menjadi bagian dari kekuasaan Orde Baru sehingga kebijakan mereka masih dipengaruhi kepentingan rezim Soeharto. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang lebih harmonis antara Islam dan militer, tetapi tetap menyimpan sisi paradoks dalam praktik kekuasaan Orde Baru.

### **D. Akomodasi Islam Politik**

Pada akhir 1980-an hingga 1990-an, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan sikap yang lebih akomodatif terhadap Islam politik. Perubahan ini terjadi karena aktivis Islam menggunakan pendekatan baru yang lebih substantif, yaitu menekankan nilai-nilai sosial, moral, dan pembangunan masyarakat, bukan lagi perjuangan formal mendirikan negara Islam.

---

<sup>36</sup> Peter A. Britton, *Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia: Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa Dan Barat*, Cet. 1 (LP3ES, 1996).

<sup>37</sup> Ulil Abshar Abdalla, "Umat Islam Dan Politik Representasi," *Ulumul Qur'an* 6, no. 2 (1995).

<sup>38</sup> Riza Zihbudi, "Tragedi Tanjung Priok," in *Militer Dan Politik Kekerasan Orde Baru*, ed. Ikrar Nusa Bhakti (Penerbit Mizan & Tim Peneliti LIPI, 2001).

Akomodasi pemerintah terlihat dari semakin banyaknya tokoh Muslim yang masuk ke lembaga pemerintahan, parlemen, dan birokrasi. Walaupun proses ini sudah dimulai sejak awal Orde Baru, puncaknya terjadi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an ketika akses politik umat Islam semakin besar.

Perubahan ini didorong oleh meningkatnya pendidikan dan perkembangan ekonomi umat Islam sehingga banyak Muslim masuk ke kalangan profesional dan kelas menengah. Selain itu, muncul generasi baru aktivis Islam yang lebih terbuka dan memilih memperjuangkan kepentingan umat melalui birokrasi, organisasi sosial, dan jalur politik resmi.

Akomodasi ini semakin kuat dengan berdirinya ICMI yang dipimpin B.J. Habibie. Organisasi ini menjadi wadah intelektual Muslim dan membuka jalan bagi banyak tokoh Islam untuk masuk ke parlemen dan MPR. Pada Pemilu 1997, pengaruh kelompok Islam santri semakin terlihat dalam lembaga politik negara<sup>39</sup>.

Selain di bidang politik, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung aspirasi umat Islam, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional 1989, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, pelanggaran aturan jilbab pada 1991, pendirian Bank Muamalat pada 1992, penghapusan SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah), serta semakin seringnya simbol-simbol Islam digunakan dalam ruang publik dan pidato resmi negara. Ini menunjukkan membaiknya hubungan antara negara dan umat Islam pada akhir masa Orde Baru.

### **Dominasi Militer dan Politik Orde Baru**

Pada awal Orde Baru, militer menjadi kekuatan politik utama yang mengendalikan kehidupan negara. Melalui konsep Dwifungsi ABRI, militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga masuk ke dalam birokrasi, politik, dan pemerintahan. Dominasi tersebut semakin kuat setelah Soeharto berhasil memperoleh dukungan penuh dari Angkatan Darat pasca peristiwa G30S/PKI.

Kebijakan politik Orde Baru sangat menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Demi menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menerapkan

---

<sup>39</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton Studies in Muslim Politics (Princeton University Press, 2011).

berbagai tindakan represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan negara. Peristiwa seperti Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974, tragedi Tanjung Priok 1984, dan Talangsari 1989 menunjukkan kuatnya penggunaan pendekatan keamanan dalam menghadapi kritik sosial dan politik.

Dominasi militer juga terlihat dalam pelaksanaan pemilu dan kehidupan politik nasional. Golkar dijadikan alat politik utama pemerintah dengan dukungan birokrasi dan militer. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat menjadi terbatas dan kekuatan oposisi sulit berkembang secara bebas.

### **Peminggiran Islam Politik pada Masa Orde Baru**

Pada masa Orde Baru, pemerintah membedakan antara kehidupan beragama dan aktivitas politik Islam. Praktik keagamaan masyarakat tetap diberi ruang, tetapi gerakan Islam politik diawasi dan dibatasi secara ketat. Pemerintah menganggap Islam politik memiliki potensi mengganggu persatuan nasional dan stabilitas negara.

Pemerintah menolak rehabilitasi Partai Masyumi dan melakukan penyederhanaan partai politik pada tahun 1973 dengan menggabungkan partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu, penerapan asas tunggal Pancasila pada tahun 1984 semakin mempersempit ruang gerak politik Islam.

Kebijakan tersebut memunculkan ketegangan antara pemerintah dan umat Islam. Banyak kalangan Muslim menilai pemerintah terlalu represif terhadap aspirasi politik Islam, terutama dalam kasus larangan jilbab, kontroversi Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai tindakan represif terhadap kelompok Islam. Kondisi ini menyebabkan hubungan Islam dan negara menjadi kurang harmonis selama dua dekade awal pemerintahan Orde Baru. Tekanan politik yang dialami umat Islam mendorong munculnya generasi baru pemikir Muslim yang lebih moderat dan terbuka. Mereka tidak lagi memperjuangkan negara Islam secara formal, melainkan menekankan nilai-nilai substansial Islam seperti keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan.

Gerakan pembaruan Islam berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahid, dan Djohan Effendi. Salah satu gagasan penting yang muncul adalah slogan “Islam Yes, Partai Islam No” yang menegaskan bahwa perjuangan Islam tidak harus melalui partai politik Islam. Pendekatan ini lebih menekankan penerapan



nilai Islam dalam kehidupan masyarakat daripada simbol formal negara Islam. Pemikiran baru tersebut menjadi strategi alternatif bagi umat Islam di tengah kebijakan depolitisasi Orde Baru. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan substantif, hubungan antara Islam dan negara perlahan mulai membaik.

### **Kebangkitan dan Harmonisasi Islam pada Akhir Orde Baru**

Tekanan politik yang dialami umat Islam pada masa Orde Baru mendorong lahirnya generasi baru pemikir Muslim yang lebih moderat, terbuka, dan inklusif. Jika pada masa sebelumnya sebagian kelompok Islam lebih menekankan perjuangan melalui partai politik Islam dan gagasan negara Islam, maka pada masa Orde Baru muncul pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada nilai-nilai substansial Islam seperti keadilan, demokrasi, kemanusiaan, toleransi, dan pembangunan moral masyarakat. Perubahan cara pandang ini dipengaruhi oleh situasi politik Orde Baru yang membatasi ruang gerak Islam politik formal melalui berbagai kebijakan depolitisasi.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak intelektual Muslim mulai menyadari bahwa perjuangan Islam tidak harus dilakukan melalui jalur politik praktis. Mereka kemudian memilih jalur dakwah, pendidikan, pemikiran, dan gerakan sosial sebagai sarana perjuangan umat Islam. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuasaan negara.

Gerakan pembaruan Islam berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid, Ahmad Wahid, dan Djohan Effendi. Mereka membawa gagasan baru mengenai hubungan Islam dengan negara, demokrasi, pluralisme, dan modernisasi. Para tokoh tersebut berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan perkembangan zaman dan dapat berjalan seiring dengan sistem negara modern.

Salah satu gagasan yang paling berpengaruh adalah slogan “Islam Yes, Partai Islam No” yang diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid. Gagasan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tidak harus diwujudkan melalui simbol atau partai politik Islam. Menurutnya, Islam harus dipahami sebagai ajaran moral dan etika yang mampu memberikan solusi bagi persoalan masyarakat. Dengan demikian, perjuangan umat

Islam tidak hanya terfokus pada perebutan kekuasaan politik, tetapi juga pada pembangunan kualitas pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Pemikiran tersebut membawa perubahan besar dalam pola gerakan Islam di Indonesia. Islam mulai dipahami secara lebih substantif daripada formalistik. Banyak kalangan intelektual Muslim mulai mengembangkan pemikiran yang lebih terbuka terhadap demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan dialog antaragama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan moral yang mendukung kemajuan bangsa tanpa harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam.

Selain dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri, kebangkitan pemikiran Islam juga didorong oleh meningkatnya akses pendidikan bagi umat Islam. Banyak mahasiswa dan cendekiawan Muslim Indonesia melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah maupun negara-negara Barat. Dari pengalaman tersebut, mereka membawa pulang berbagai gagasan baru tentang pembaruan Islam, demokrasi, dan modernisasi. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian berkembang di kampus, pesantren, organisasi mahasiswa, dan forum-forum diskusi intelektual.

Perkembangan pemikiran Islam modern juga didukung oleh peran organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut lebih menekankan dakwah sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat daripada perjuangan politik praktis. Melalui sekolah, universitas, pesantren, rumah sakit, dan kegiatan sosial lainnya, organisasi-organisasi Islam berhasil membangun pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di kalangan mahasiswa dan generasi muda Muslim, muncul pula berbagai gerakan intelektual Islam yang aktif melakukan kajian keislaman di kampus-kampus. Gerakan ini melahirkan generasi Muslim terdidik yang memiliki pemahaman Islam yang lebih modern dan kritis. Mereka mulai membahas isu-isu seperti demokrasi, keadilan sosial, kemiskinan, korupsi, dan hak asasi manusia dari perspektif Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun kehidupan sosial dan politik yang lebih adil.

Kebangkitan pemikiran Islam pada masa Orde Baru juga menunjukkan adanya perubahan strategi perjuangan umat Islam. Jika sebelumnya perjuangan lebih banyak dilakukan melalui konfrontasi politik dengan negara, maka pada masa ini umat Islam

lebih memilih pendekatan kultural dan intelektual. Pendekatan tersebut terbukti lebih mampu bertahan di tengah tekanan politik pemerintah Orde Baru yang cenderung represif terhadap gerakan politik Islam. Seiring berkembangnya pemikiran Islam yang moderat dan inklusif, hubungan antara umat Islam dan pemerintah perlahan mulai mengalami perubahan. Pemerintah mulai melihat bahwa umat Islam tidak selalu menjadi ancaman politik bagi negara. Sebaliknya, umat Islam dapat menjadi mitra dalam pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

Perubahan hubungan tersebut mulai terlihat jelas pada akhir 1980-an ketika pemerintah Orde Baru menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap umat Islam. Banyak tokoh Muslim mulai memperoleh posisi penting dalam birokrasi dan pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga mulai mendukung berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebangkitan pemikiran Islam berhasil menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara Islam dan negara menjelang akhir masa Orde Baru.

## **KESIMPULAN**

Dinamika Islam pada masa Orde Baru menunjukkan adanya perubahan hubungan antara Islam, militer, dan negara dari pola yang represif menuju pola yang lebih akomodatif. Pada awal Orde Baru, pemerintah melakukan pembatasan terhadap gerakan Islam politik melalui berbagai kebijakan depolitisasi, penyederhanaan partai politik, serta penerapan asas tunggal Pancasila. Dalam periode tersebut, militer menjadi kekuatan dominan dalam kehidupan politik nasional melalui konsep Dwifungsi ABRI.

Namun, sejak akhir 1980-an terjadi perubahan penting dalam hubungan Islam dan negara. Munculnya generasi baru intelektual Muslim yang lebih moderat dan substantif berhasil mengubah cara perjuangan Islam politik sehingga lebih mudah diterima oleh pemerintah. Perubahan sikap pemerintah terhadap umat Islam juga terlihat melalui berbagai kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kepentingan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam.

Dengan demikian, hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru tidak selalu bersifat konflik, tetapi mengalami perkembangan menuju harmonisasi pada akhir pemerintahan Soeharto. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan strategi perjuangan Islam politik memiliki pengaruh besar terhadap membaiknya hubungan antara umat Islam, militer, dan negara di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdalla, Ulil Abshar. "Umat Islam Dan Politik Representasi." *Ulumul Qur'an* 6, no. 2 (1995).
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Cet. 1. Edited by Wahid Wahab. PT Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Arizal, Joko. "PERTARUNGAN DISKURSIF ISLAM POLITIK DALAM WACANA PENERAPAN SYARIAT ISLAM PASCA ORDE BARU." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (2022): 84–96. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920>.
- Britton, Peter A. *Profesionalisme Dan Ideologi Militer Indonesia: Perspektif Tradisi-Tradisi Jawa Dan Barat*. Cet. 1. LP3ES, 1996.
- Cholisin. *Militer Dan Gerakan Prodemokrasi: Studi Analisis Tentang Respons Militer Terhadap Gerakan Prodemokrasi Di Indonesia*. 1st ed. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Crouch, Harold A. *The Army and Politics in Indonesia*. 1st ed. Equinox Pub, 2007.
- Djiwandono, J. Soedjati. "Hegemoni Militerisme." In *Military Without Militarism: Suara Dari Daerah*, edited by Anas S. Machfudz and Jaleswari Pramodawardhani. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2001.
- Effendi, Muhamad Ridwan, and Iqbal Syafrudin. "Pertalian Agama Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 2 (2020): 12–27. <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14528>.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina, 1998.
- Haris, Syamsuddin. *PPP Dan Politik Orde Baru*. Edited by Ridwan Saidi. Seri Pendidikan Politik. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton Studies in Muslim Politics. Princeton University Press, 2011.



- Huda, Muchammad Nur. "Post-Islamism: The New Face of Political Islam in Indonesia." *Journal Intellectual Sufism Research (JISR)* 3, no. 2 (2021): 46–53. <https://doi.org/10.52032/jisr.v3i2.94>.
- Husken, Frans, and Hubb de Jonge. *Orde Zonder Order: Kekerasan Dan Dendam Di Indonesia 1965-1998*. Edited by Retno Suffatni. Translated by M. Imam Aziz. LKiS, 2002.
- Ihsan, A. Bakir. "Perubahan Hubungan Islam Dan Militer Di Indonesia (1990-1998)." Master Thesis, Universitas Indonesia, 2000.
- Kadi, Saurip. *TNI-AD dahulu, sekarang, dan masa depan*. Cet. 1. With Pusat Studi Masalah-Masalah Militer (Jakarta, Indonesia). Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Edited by A. E. Priyono. Mizan, 2008.
- Liddle, R. William. *Islam, Politik, Dan Modernisasi*. Cet. 1. Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu, Masa Demokrasi Terpimpin, 1959-1965*. 2nd ed. Edited by Julizar Firmansyah. Gema Insani Press, 1996.
- Mortimer, Rex. "Class, Social Cleavage and Indonesian Communism." *Indonesia* 8 (October 1969): 1–20.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 20, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.7454/MJS.v20i1.1089>.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Legislating Civil–Military Relations in Post-Reformasi Indonesia." *Global Change, Peace & Security* 37, no. 2 (2026): 125–42. <https://doi.org/10.1080/14781158.2025.2611247>.
- Pauker, Guy J. "Indonesia: The Year of Transition." *Asian Survey* 7, no. 2 (1967): 138–50. <https://doi.org/10.2307/2642526>.
- Ramidi, Akhmad, and Suhaili. "Menjadi Muslim Urban: Negosiasi Identitas dan Kesalehan Anak Muda Indonesia." *Ulul Albab: Journal Da`wah and Social Religiosity* 3, no. 2 (2025): 24–35. <https://doi.org/10.69943/t5c3ec13>.
- Said, Salim. "Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang Dan Pada Masa Datang." In *Prisma: Angkatan Muda Angkat Bicara*, vol. 6. LP3ES, 1987.



- Sebastian, Leonard C., Emirza Adi Syailendra, and Keoni Indrabayu Marzuki. "Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period." *Asia Policy* 13, no. 3 (2018): 49–78. <https://doi.org/10.1353/asp.2018.0041>.
- Simatupang, Tahi Bonar. "Menelaah Kembali Peranan TNI: Refleksi Kesejarahan Dan Perspektif Masa Depan." In *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia*, edited by Farchan Bulkin. LP3ES, 1985.
- Sitompul, Agussalim. *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta: Antara Impian Dan Kenyataan*. Gunung Agung, 1982.
- Soebijono, ed. *Dwifungsi ABRI: perkembangan dan peranannya dalam kehidupan politik di Indonesia*. Cet. 1. Gadjah Mada University Press, 1992.
- Stowasser, Barbara Freyer. "Agama Dan Perkembangan Politik: Antara Ibn Khaldun Dan Machiavelli." *Uhumul Qur'an: Jurnal Ilmu Dan Kebudayaan* 5, no. 4 (1994).
- Suaedy, Ahmad. "TRANSFORMASI ISLAM INDONESIA DALAM TREND GLOBAL: Mencari Penjelasan 'MODERASI BERAGAMA' DI RUANG PUBLIK." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 24, no. 3 (2022): 319–32. <https://doi.org/10.55981/jmb.1807>.
- Sundhaussen, Ulf. *Politik militer Indonesia 1945-1967: menuju dwi fungsi ABRI*. Edited by Masmimar Mangiang. Translated by Hasan Basari. LP3ES, 1986.
- Susanto, A. Budi, and A. Made Tony Supriatma. *ABRI: Siasat Kebudayaan, 1945-1995*. Cet. 1. Penerbit Kanisius & Lembaga Studi Realino, 1995.
- Syamsul, Kholil, and Abd. Muis. "Islamic Education in the Age of Artificial Intelligence Policy Responses to Digital Transformation and Teacher Competency Challenges." *DAAR EL-MAKRIFAH: Journal of Islamic Religious Education* 2, no. 1 (2026): 126–44. <https://doi.org/10.66931/jpai.v2i01.417>.
- Wangge, Hipolitus Yolisandry Ringgi. "Civil–Military Relations during Transition and Post-Democratisation Periods: A View from Southeast Asia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 36, no. 2 (2017): 137–48. <https://doi.org/10.1177/186810341703600205>.
- Zihbudi, Riza. "Tragedi Tanjung Priok." In *Militer Dan Politik Kekerasan Orde Baru*, edited by Ikrar Nusa Bhakti. Penerbit Mizan & Tim Peneliti LIPI, 2001.